

# PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI LAMPUNG

Amelia Anwar<sup>1</sup>, Septi Juryani<sup>2</sup>

e-mail: ameliaanwar@umitra.ac.id<sup>1</sup>, septijuryani123@gmail.com<sup>2</sup>

<sup>1), 2</sup> Akuntansi, Universitas Mitra Indonesia

Jl. ZA Pagaralam, No 07, Gedung Menang, Rajabasa, Bandar Lampung

## Abstract

*The purpose of this study is to determine how much influence government accounting standards, accounting information systems, and the quality of financial statements have on performance accountability at the Public Works and Spatial Planning Office of Lampung Province. In this study using a quantitative descriptive approach where the data processing is carried out statistically. The number of samples taken was 44 respondents using the Non probability sampling method. The source of data in this study is primary data obtained using questionnaires which are then processed with multiple linear analysis tests using SPSS version 21. The results of this study show that Government Accounting Standards, Accounting Information Systems and Financial Statement Quality have a positive and significant effect simultaneously on the Performance Accountability of the Public Works and Spatial Planning Office of Lampung Province.*

*Keywords: government accounting standards, accounting information systems, quality of financial statements, performance accountability*

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi, dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dimana pengolahan datanya dilakukan secara statistik. Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 44 responden dengan metode *Non probability sampling*. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang kemudian diolah dengan uji analisis linier berganda menggunakan SPSS versi 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.

Kata Kunci : standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi, kualitas laporan keuangan, akuntabilitas kinerja

## 1. Pendahuluan

Sistem pemerintah Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yaitu dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mempunyai tujuan untuk memberikan suatu pedoman dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah pusat maupun pada tingkat daerah. Standar

akuntansi pemerintah merupakan suatu yang nantinya akan membantu untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Sesuai dengan pasal 32 UU No. 17 tahun 2003 tentang bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Ditegaskan pula dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua. Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua

adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis Akrua, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Bersama diberlakukannya undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, yang memfokuskan pada pola transparansi serta akuntabilitas jelas terlihat bahwa pemerintah menginginkan adanya pola penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah tidak hanya berusaha akan melibatkan semua komponen masyarakat tetapi hasil akhir dari semua itu tertuju untuk kepentingan masyarakat, dengan demikian diharapkan pemerintah daerah kabupaten atau kota dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna atas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pembangunan didaerahnya. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan optimalisasi belanja yang dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Kewajiban dari instansi adalah mengelola keuangan serta mempertanggungjawabkan penggunaan keuangannya sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. Berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan karena laporan keuangan yang transparansi dan akuntabel merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan laporan keuangan perlu melakukan analisis terhadap laporan keuangan untuk mengetahui aktivitas keuangan, investasi, serta aktivitas operasional dari suatu perusahaan. Berbagai alat dirancang untuk membantu pengguna menganalisis laporan keuangan [1].

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menilai kualitas laporan keuangan setiap tahunnya dengan memberikan opini. Opini Wajar Tanpa Pengecualian akan diberikan jika salah saji yang material tidak ada pada laporan keuangan, penerapan sistem akuntansi dan SPI terlaksana dengan baik. Opini Wajar Dengan Pengecualian diberikan apabila memiliki SPI baik, tetapi ada salah saji yang cukup material. Opini Tidak Wajar diberikan ketika SPI tidak baik, serta terdapat salah saji yang cukup material dan laporan keuangan disusun secara tidak wajar berdasarkan SAP. Opini Tidak Menyatakan Pendapat, auditor tidak menyatakan pendapat dikarenakan lingkungan audit yang membuat tidak cukup dalam memberikan sebuah opini.

Kejadian banyak dijumpai dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah yang ditemukan oleh BPK bahwa terdapat pemerintah daerah melakukan penyimpangan dengan tidak menyajikan data sesuai dengan peraturan. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2021 menunjukkan dari 541 LKPD yang telah diperiksa oleh BPK memperoleh opini selain WTP sebanyak LKPD, terdiri dari 38 opini Wajar Dengan Pengecualian

dan 3 Tidak Menyatakan Pendapat. Permasalahan LKPD tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP), Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah [2]. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas [3].

Indikator standar akuntansi pemerintah (Bastian Indra, 2011) adalah sebagai berikut basis akuntansi, Nilai Otentik (Biaya Historis), jujur sepenuhnya, presentasi yang wajar.

### 2.2 Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan [4]. Hal ini termasuk orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, kontrol internal serta langkah-langkah keamanan [5]. Sistem Informasi Akuntansi meliputi proses, prosedur, dan sistem yang menangkap data akuntansi dari proses bisnis, mencatat data akuntansi ke dalam catatan yang sesuai, memproses data akuntansi secara terperinci dengan mengklasifikasikan, merangkum, dan mengkonsolidasikan serta melaporkan data akuntansi yang diringkas ke pengguna internal maupun eksternal [6].

Indikator sistem informasi akuntansi yaitu [7] yaitu Perangkat keras (*Hardware*), Perangkat lunak (*Software*), Manusia (*Brainware*), *Procedure* (prosedur), Database (basis data), *Communication Network* (jaringan komunikasi) [8].

### 2.3 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan adalah yang relevan, laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan mengevaluasi peristiwa masa lalu atau memprediksi masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi dan informasi disajikan tepat waktu dan lengkap. Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang mengelirukan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi [9].

Indikator kualitas Laporan Keuangan [10] yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

## 2.4 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara variabel. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [11].

Indikator Akuntabilitas Kinerja [12] yaitu Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Akuntabilitas Manajerial, Akuntabilitas Program, Akuntabilitas kebijakan dan Akuntabilitas Finansial.

## 3. Metode Penelitian

### 3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian sebagai kerangka yang telah dibuat sebelumnya berguna menjadi arahan atau petunjuk secara sistematis terkait apa, kapan dan bagaimana penelitian dilakukan [13]. Tujuan dilakukannya penelitian ini guna mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting, dalam penelitian ini kerangka berpikir yaitu standar akuntansi pemerintah pengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja, sistem informasi akuntansi pengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja, kualitas laporan keuangan pengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja. standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi dan kualitas laporan keuangan pengaruh simultan terhadap akuntabilitas kinerja.

### 3.2 Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif

### 3.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan, yakni data yang diolah berupa angka yang didapat dari skala kuisioner yang peneliti sebar pada responden yang selanjutnya diolah dengan menggunakan software SPSS 21.

### 3.4 Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan [14]. Pengambilan sampel dengan menggunakan Metode *Non probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar. Berdasarkan

data yang diperoleh, diketahui jumlah anggota pegawai yang terkait dalam pembuatan Laporan Keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung sebanyak 44 orang.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan kuesioner.

### 3.6 Variabel Penelitian

#### 1. Variabel Independen (bebas)

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan

#### 2. Variabel Dependen (Terikat)

Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Akuntabilitas Kinerja.

### 3.7 Hipotesis

H1 : Diduga Standar akuntansi pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.

H2 : Diduga Standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.

H3 : Diduga Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.

H4 : Diduga Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.

## 4. Pembahasan dan Hasil

### 1. Uji Normalitas

#### 1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel *independen* (X) dan variabel *dependen* (Y) keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji test normalitas terlihat bahwa variabel residual dalam penelitian ini mempunyai nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar  $0,625 > 0,05$  dengan kata lain data tabulasi kuisioner berdistribusi normal.

#### 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan uji untuk melihat kedalam model regresi suatu penelitian apakah ditemukan adanya interkorelasi antara variabel-variabel bebas (*independent*) yang digunakan dalam penelitian ini. Model regresi yang baik harusnya tidak memiliki korelasi antar variabel *independent*. Pada umumnya nilai cut off yang digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance*  $\geq 0,10$  atau sama dengan nilai *VIF*  $\leq 10$ .

Hasil yang diuji dalam penelitian dapat dilihat dari nilai

tolerance masing-masing variabel bebas menunjukkan bahwa nilai dari standar akuntansi pemerintah ( $X_1$ ) 0,762, sistem informasi akuntansi ( $X_2$ ) 0,988, dan kualitas laporan keuangan ( $X_3$ ) 0,770 dari masing-masing nilai tolerance lebih besar dari 0,10 ( $>0,10$ ) maka artinya tidak terjadi multikolinieritas. Kemudian pada masing-masing variabel yaitu standar akuntansi pemerintah ( $X_1$ ) 1,313, sistem informasi akuntansi ( $X_2$ ) 1,013 dan kualitas laporan keuangan ( $X_3$ ) 1,299 menunjukkan nilai VIF lebih kecil dari 10,00 ( $<10,00$ ) maka artinya tidak terjadi multikolinieritas.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah adanya gangguan yang ada pada suatu penelitian. Metode untuk menguji penelitian ini dilakukan dengan metode grafik *scatterplot*. Dalam model regresi adalah tetap, yang disebut heteroskedastisitas jika titik-titik merambat diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dari hasil Uji Heteroskedastisitas diatas, grafik *Scatterplot* yang disajikan pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi

### 4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem autokorelasi*. Tentu saja model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pada prosedur pendeteksian masalah autokorelasi dapat digunakan besaran Durbin-Watson. Untuk memeriksa ada tidaknya autokorelasi, maka dilakukan uji Durbin-Watson dengan keputusan sebagai berikut:

- Jika  $d < dL$  atau  $d > 4-dL$ , maka yang artinya terdapat autokorelasi
- Jika  $d_u < d < (4-d_u)$ , berarti tidak terdapat autokorelasi
- Jika  $dL < dU$  atau  $4-dU < 4-dL$ , Maka tidak dapat disimpulkan.

Hasil uji autokorelasi pada tabel Durbin Waston menunjukkan nilai sebesar  $dw$  1,815, dan hasil dari Durbin Waston sebesar  $dL$  1,374,  $dU$  = 1,664,  $4-dL$  : 2,626,  $4-dU$  : 2,336. Jadi dapat diartikan bahwa uji autokorelasi pada penelitian ini yakni  $dU < d < 4-dU$  ( $dU$  = 2,336  $< d$  1,374  $< 4-dU$  2,336) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam data ini.

### 2. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari tabel 4.13

diatas maka dapat dibuat sebuah persamaan koefisien regresi yakni

$$Y = 22,930 - 0,409 X_1 - 0,275 X_2 + 0,686 X_3 + e$$

dengan penjelasan sebagai berikut :

- Nilai Konstanta ( $\alpha$ ) pada persamaan regresi sebesar 22,930 jika kenaikan sebesar 0 artinya dengan dipengaruhi variabel Standar Akuntansi Pemerintah ( $X_1$ ), Sistem Informasi Akuntansi ( $X_2$ ) dan Kualitas Laporan Keuangan ( $X_3$ ) maka variabel Akuntabilitas Kinerja (Y) dianalogikan bernilai sebesar konstanta tersebut.
- Nilai  $b_1 = -0,409$  yang memiliki arti jika variable Standar Akuntansi Pemerintah ( $X_1$ ) terjadi kenaikan sebesar satu (satu) disaat bersamaan variabel lain diasumsikan konstan, maka variable Akuntabilitas Kinerja (Y) akan terjadi kenaikan sebesar -0,409.
- Nilai  $b_2 = -0,275$  yang memiliki arti jika variable Sistem Informasi Akuntansi ( $X_2$ ) terjadi kenaikan sebesar satu (satu) disaat bersamaan variabel lain diasumsikan konstan, maka variable Akuntabilitas Kinerja (Y) akan terjadi kenaikan sebesar -0,275.
- Nilai  $b_3 = 0,686$  yang memiliki arti jika variable Kualitas Laporan Keuangan ( $X_3$ ) terjadi kenaikan sebesar satu (satu) disaat bersamaan variabel lain diasumsikan konstan, maka variable Akuntabilitas Kinerja (Y) akan terjadi kenaikan sebesar 0,686.

### 3. Koefisien determinasi

Berdasarkan hasil uji Determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh *R Square* sebesar 0,402 yang berarti 40,2% variabel Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan dipengaruhi oleh Akuntabilitas Kinerja. Sedangkan sisanya (100-40,2%) adalah sebesar 59,8% yang dipengaruhi oleh Variabel lain diluar persamaan.

### 4. Uji Hipotesis

#### 1. Uji f (Simultan)

Uji f digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan dari variable bebas terhadap variable terikat. Berdasarkan tabel 4.15 diatas diketahui nilai  $F_{hitung}$  sebesar 8,980 dan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 2,83. Karena nilai  $F_{hitung}$  8,980  $> F_{tabel}$  2,83 dan nilai *sig* 0,000  $< 0,05$ . Maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak yang artinya variabel Standar Akuntansi Pemerintah ( $X_1$ ), Sistem Informasi Akuntansi ( $X_2$ ) dan Kualitas Laporan Keuangan ( $X_3$ ) berpengaruh dan Signifikan secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.

#### 2. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial (individu) dari variable bebas terhadap variable terikat. Berdasarkan tabel 4.16 diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Standar Akuntansi Pemerintah ( $X_1$ ) dilihat dari nilai  $T_{hitung}$  -3,058  $> T_{tabel}$  1,683 dengan tingkat signifikan sebesar 0,004  $< 0,05$ . Variabel Standar Akuntansi Pemerintah secara parsial

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung. Maka kesimpulannya  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. ( $T_{tabel}$  terlampir)

2. Sistem Informasi Akuntansi ( $X_2$ ) dilihat dari nilai  $T_{hitung} -2,878 < T_{tabel} 1,683$  dengan tingkat signifikan sebesar  $0,006 < 0,05$ . Variabel sistem informasi akuntansi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung. Maka kesimpulannya  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. ( $T_{tabel}$  terlampir)
3. Kualitas Laporan Keuangan ( $X_3$ ) dilihat dari nilai  $T_{hitung} 4,288 > T_{tabel} 1,683$  dengan tingkat signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Variabel Kualitas Laporan Keuangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung. Maka kesimpulannya  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. ( $T_{tabel}$  terlampir)

#### 5. Pembahasan

1. Pengaruh Standar akuntansi pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah, sistem informasi akuntansi dan kualitas laporan keuangan secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, semakin tinggi nilai standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan maka semakin tinggi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Pengaruh Standar akuntansi pemerintah terhadap untuk Akuntabilitas kinerja, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, apabila semakin baik standar akuntansi pemerintah, maka semakin besar pula tingkat akuntabilitas kinerja. Standar akuntansi pemerintah ini dapat disimpulkan sebagai alat untuk memenuhi pelaporan yang semakin transparan dan akuntabel. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan adalah dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan pada standar akuntansi pemerintah.
3. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap untuk Akuntabilitas kinerja, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas

kinerja, sistem informasi akuntansi dapat membuat akuntabilitas dalam pencapaian kinerja terutama dalam pengelolaan data keuangan sehingga akan terwujudnya transparansi dan pertanggungjawabkan. Sehingga pelaporan keuangan yang menjadi bagian dari kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan akan selesai tepat waktu.

4. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap akuntabilitas kinerja, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, Laporan keuangan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja suatu instansi hendaknya dapat memberikan informasi yang akurat dan jelas sebagai bentuk pertanggung jawaban. Laporan keuangan harus dapat menunjukkan informasi tentang kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibutuhkan karena laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam mengambil keputusan guna melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan agar lebih baik dan maksimal.

#### 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penulis menarik kesimpulan atas peneliti yang dilakukan sebagai berikut :

1. Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.
2. Standar Akuntansi Pemerintah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.
3. Sistem Informasi Akuntansi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.
4. Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.

#### Daftar Pustaka

- [1] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Pert. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- [2] Suwanda Dadang, *Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah Berpedoman SAP Berbasis Akrual*. Jakarta: PPM Manajemen, 2015.

- [3] M. K. Turner, L., Weickgenannt, A., & Copeland, *Accounting Information System Controls And Processes Third Edition*. Hokoben: John Wiley & Sons Inc, 2017.
- [4] A. Susanto, *Sistem Informasi Akuntansi Struktur Pengendalian Resiko Pengembangan*. Bandung: Lingga Jaya, 2013.
- [5] P. J. S. Marshall B. Romney, *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat,- Cetakan Ketujuh, 2019.
- [6] Y. A. A. dan N. A. S. Sudaryo, *Manajemen Sumber Daya Manusia Kompensasi Tidak Langsung dan Lingkungan Kerja Fisik*. Yogyakarta: ANDI, 2017.
- [7] E. Ridzal, N. A., Sujana, I. W., & Malik, "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan," 2022.
- [8] Batian Indra, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2. Jakarta: Selemba Empat, 2011.
- [9] L. I. Hartono, *Akuntansi Sektor Publik*. 2021.
- [10] Siregar Baldric, "Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI," *UPP STIM YKPN*, 2017.
- [11] N. Rusdiana, A., & Nasihudin, "Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian," 2021.
- [12] Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- [13] S. Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Selemba Empat, 2016.
- [14] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta, 2018.